



TABLOID

REFERENSI PEMILU 2024

info indonesia

MINGGU I | JULI 2023

*Road to
Election
2024*



**SATU-SATUNYA PERAIH
SATYALANCANA
PEMBANGUNAN**

**HARUMKAN
SUMSEL DI
KANCAH NASIONAL**

**KOLABORASIKAN
RITEL MODERN
DAN UMKM**

**MENEMBUS
DOMINASI
LELAKI POLITISI**

**JAGA PARTISIPASI
PEMILIH TANPA
KTP ELEKTRONIK**

HERMAN DERU FOKUS PADA PEMERATAAN PEMBANGUNAN

Komitmen Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, dan Wakil Gubernur, Mawardi Yahya, dalam melakukan pemerataan pembangunan terus dibuktikan. Bahkan, pemerataan pembangunan tersebut dilakukan hingga ke pelosok

Ibadah Haji dan Politik

“**B**orok-borok kelakuan seseorang atau kelompok orang, betapa pun dibungkus rapi, pasti suatu saat akan ketahuan.” (Ahmad Syafii Maarif, Kompas, 9 Juli 2011).

Haji adalah ibadah mulia menuju Allah. Wafat di Tanah Suci saat menunaikan ibadah haji dianggap sebagai ujung perjalanan yang mulia.

Ibadah haji, kata Ali Shariati (1978), mencerminkan kepulauan menuju Allah yang mutlak, yang tidak memiliki keterbatasan, yang tidak diserupai oleh apa pun.

Pada musim haji tahun ini, banyak politisi beramai-ramai pergi menunaikan ibadah haji bersama 209.782 anggota jemaah yang lain, termasuk para bakal calon presiden dan calon wakil presiden.

Kita doakan ibadah haji mereka diterima Allah SWT dan dinyatakan lulus sebagai haji mabrur, yakni haji yang dianggap sah dari segi syarat dan rukunnya dan berdampak positif-konstruktif bagi kemanusiaan saat kembali ke Tanah Air.

Bagi yang sudah melaksanakan ibadah haji, sejatinya tidak perlu lagi pergi untuk yang kedua, ketiga, dan seterusnya, karena ibadah haji itu wajib hanya untuk satu kali seumur hidup. Menurut riwayat yang sahih, Nabi Muhammad SAW pun sepanjang hidupnya hanya sekali menunaikan ibadah haji.

Dalam konteks Indonesia, ibadah haji lebih dari sekali tidak dianjurkan karena akan mengurangi kuota bagi mereka yang belum melaksanakannya, yang harus antre hingga puluhan tahun lamanya. Menurut KH Ali Mustafa Yaqub, haji yang lebih dari satu kali haram hukumnya dan bahkan termasuk perbuatan zalim.

Sayang, pendapat Imam Besar Masjid Istiqlal yang wafat 28 April 2016 tersebut tak populer dan diabaikan mereka yang gemar menunaikan ibadah haji.

Dampak politis haji

Dalam masyarakat Indonesia, agama menjadi aspek yang sangat penting. Politisi yang taat beragama akan memiliki nilai plus, dianggap lebih baik ketimbang yang tidak taat beragama. Maka jangan heran jika ada orang yang pernah bersalah, untuk menghapus kesalahannya dengan bertobat (memohon ampun kepada Allah) alih-alih meminta maaf kepada sesama manusia yang telah dirugikan karena kesalahannya.

Haji (juga umrah) adalah ibadah yang kerap dianggap tepat untuk bertobat karena di



Oleh: Abd Rohim Ghazali
Direktur Eksekutif Maarif Institute

dalam ibadah haji ada momen yang diyakini bisa meluruhkan semua dosa, di samping adanya keyakinan terkabulnya semua doa yang dipanjatkan di depan Kabah atau di Padang Arafah. Oleh karena itu, kita bisa memahami jika ada koruptor yang menunaikan ibadah haji dan umrah berkali-kali.

Padahal, seperti kata Buya Syafii, betapa pun dibungkus rapi (termasuk dibungkus dengan agama), borok itu suatu saat pasti

Dalam konteks sejarah Indonesia, dampak politis haji bisa dilacak sejak zaman kolonial Belanda. Di antara yang paling ditakuti pemerintah kolonial Belanda dari penduduk pribumi adalah meningkatnya jumlah jemaah haji. Anggapan umum masyarakat Belanda, ibadah haji ke Mekkah hanya akan menyebabkan “ribuan jemaah yang damai menjadi pemberontak yang fanatik” (Benda, 1972:86).

Bahkan, menurut penelitian Aqib Suminto (1991), ada suara parlemen Belanda yang mengatakan bahwa “melarang ibadah haji lebih baik dari menembak mati mereka”. Oleh karena itu, tidak heran kalau kemudian pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1872 membuka konsulat di Jeddah yang antara lain bertugas memantau segala gerak-gerik pribumi di Tanah Suci, terutama jemaah haji.

Penasihat politik kolonial Belanda, Snouck Hurgronje, pernah menyarankan pemerintah untuk melarang ibadah haji ke Mekkah yang disebutnya sebagai kota suci yang menjadi jantung kehidupan agama

pribumi yang baru kembali dari Tanah Suci dan berkenalan dengan semangat Pan Islamisme.

Era Nabi Muhammad SAW

Di periode awal kemunculan Islam, tepatnya tahun ke-6 Hijrah, Nabi beserta sahabatnya bermaksud melaksanakan ibadah haji. Rombongan haji pertama ini berhenti di Hudaibiyah untuk memulai ihram, tapi gagal, tak dilanjutkan karena para musuh Nabi yang kala itu masih menguasai Mekkah menganggap haji Nabi bersifat politis.

Ketegangan pun terjadi dan berakhir dengan shulh al-Hudaibiyah (perjanjian Hudaibiyah) yang di antaranya berisi Nabi boleh kembali melakukan ibadah haji tahun berikutnya.

Sesuai isi perjanjian, tahun berikutnya (ke-7 H) Nabi SAW beserta para sahabat kembali menunaikan ibadah haji. Perjalanan jauh menuju Mekkah membuat para sahabat kelelahan. Kondisi semacam itu kurang menguntungkan bagi “harga politik” umat Islam di mata musuh-musuh Nabi dari suku Quraish Mekkah. Maka, ketika tawaf dan sai, Nabi menganjurkan para sahabat lari-lari kecil sebagai show of force bahwa meski usai perjalanan jauh, umat Islam masih cukup memiliki kekuatan dan daya tahan.

Politik konstruktif

Penulis sama sekali tak menaruh suasan (buruk sangka) terhadap kemungkinan adanya unsur politis dalam ibadah haji para politisi. Kalaupun benar ada, semoga dalam arti positif konstruktif sebagaimana dicontohkan Nabi dan para sahabat.

Dalam sejarah umat Islam Indonesia kontemporer, ada saat umat Islam ragu-ragu menunaikan ibadah haji karena takut dituduh fanatik atau fundamentalis. Tetapi, setelah Soeharto dan Try Sutrisno (waktu itu presiden dan wapres) menunaikan ibadah haji, dampak politisnya besar sekali. Setiap tahun ada rombongan haji khusus dari Istana Negara dengan melibatkan para menteri.

Haji bagi umat Islam wajib hukumnya bagi yang mampu. Para pejabat, di mata masyarakat, adalah orang-orang yang mampu melaksanakan ibadah haji. Bagi yang mampu tetapi belum melaksanakan ibadah haji bisa dianggap aib, tak taat beragama. Maka gelar haji menjadi persyaratan “tidak resmi” yang harus dicantumkan di depan nama para pejabat. Mungkin karena alasan inilah banyak politisi yang pergi ke Tanah Suci menunaikan ibadah haji. ●



akan ketahuan.

Politisi yang menunaikan ibadah haji memang tak bisa kita tuduh sebagai haji politis dalam pengertian negatif. Ibadah haji dilakukan untuk Tuhan dan hanya Tuhan yang bisa menilainya. Kita hanya bisa menduga-duga. Tetapi bahwa ibadah haji punya dampak politis adalah fakta tak bisa dibantah.

kepulauan Nusantara yang “setiap detik selalu memompakan darah segar ke seluruh urat nadi masyarakat Islam Indonesia”.

Untuk memperkuat pendapatnya, ia ungkap beberapa fakta, seperti adanya Perang Padri (1821-1827), Perang Diponegoro (1825-1830), pemberontakan Banten (1888), dan Perang Aceh (1873-1903). Kata Snouck, semua itu karena banyak tokoh

DANA DESA MEMBANGUN NEGARA

Penyaluran Dana Desa telah meningkatkan jangkauan program pembangunan desa di wilayah Indonesia. Kegiatan pembangunan berlangsung di seluruh desa sejak pemerintah meluncurkan Dana Desa pada 2015.

Pada 2008, hanya 30 persen desa di Indonesia yang mendapatkan dana afirmasi untuk pembangunan desa dari pemerintah pusat. Persentase desa yang membangun meningkat menjadi 54 persen pada 2011 karena ada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd) dan meningkat lagi menjadi 87 persen pada 2014.

"Dan pada 2015-2023, 100 persen desa membangun dari Dana Desa," kata Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar, Kamis, 22 Juni 2023.

Abdul Halim mengatakan, pagu Dana Desa 2023 mencapai Rp68 triliun. Hingga 19 Juni 2023, sebanyak Rp30,97 triliun Dana Desa sudah disalurkan ke 72.620 desa. Dana Desa yang khusus disalurkan untuk memberikan bantuan langsung tunai atau BLT kepada warga miskin nilainya Rp3,88 triliun. Sasaran BLT Dana Desa sebanyak 2,75 juta keluarga penerima manfaat yang tersebar di 71.984 desa.

Abdul Halim menyampaikan bahwa Dana Desa 2023 telah digunakan untuk upaya peningkatan perekonomian desa, yakni membangun maupun memperbaiki jalan sepanjang 1.399 km, jembatan dengan total panjang 6.269 meter, 34 pasar desa, 13 embung, 248 unit irigasi, 22 badan usaha milik desa (BUMDes), sembilan unit tambatan perahu, dan 326 unit penahan tanah.

Selain itu, Dana Desa dimanfaatkan untuk upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat desa. Dana Desa tercatat telah digunakan untuk membangun 143 sarana olahraga, 3.393 sarana air bersih, 457 sumur, 730 MCK, dan drainase sepanjang 136.430 meter, serta mendukung penyelenggaraan pelayanan 149 pendidikan anak usia dini, 150 posyandu, dan 1.396 polindes.

Pria yang akrab disapa Gus Halim ini mengatakan, pemerintah mendampingi



dan mengawasi pemanfaatan Dana Desa untuk memastikan program dan kegiatan yang diselenggarakan betul-betul dirasakan manfaatnya oleh warga desa. "Tidak hanya dirasakan oleh kelompok kecil elit desa," ujarnya.

Desa Berkurang

Gus Halim menyampaikan penerima Dana Desa berkurang tujuh desa menjadi sebanyak 74.954 desa sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201 Tahun 2022, di mana jumlah semula dianggarkan untuk 74.961 desa.

Menurut Gus Halim terdapat beberapa hal desa tidak mendapatkan penyaluran Dana Desa yakni karena rekomendasi Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), desanya tidak ada, dan belum dicabut dari daftar yang diregister Kemendagri, dan

karena hal-hal lainnya.

Dia menyebutkan tujuh desa yang tidak mendapatkan Dana Desa yakni dua desa yang terdampak Lumpur Lapindo di Sidoarjo yaitu Desa Renokenongo dan Desa Kedungbendo. Kemudian, Desa Kanekes di Kabupaten Lebak, Banten, karena secara kultur belum bisa menerima kehadiran Dana Desa.

Terkait Desa Kanekes, Gus Halim menyampaikan bahwa kementeriannya sudah berikhtiar memahami pentingnya Dana Desa bagi pembangunan di desa tersebut.

Lalu, Desa Alur Jambu di Kabupaten Tamiang, Aceh, karena kawasan desa itu adalah kawasan

perkebunan. Desa Wanarejo di Kabupaten Balangan (Kalimantan Selatan), Desa Baturaja di Kabupaten Aceh Barat (Nanggroe Aceh Darussalam), dan Desa Misabugoid di Kabupaten Manokwari (Papua Barat).

Transparan

Gus Halim menyatakan bahwa sistem pengelolaan keuangan di level desa paling transparan di dunia. Pengelolaan keuangan desa dimulai dari rencana kerja pembangunan desa melalui Musyawarah Desa (Musdes) dengan peserta kepala desa, perangkat desa, warga desa, dan perwakilan kelompok marjinal.

"Hanya Musdes yang melibatkan hingga kelompok marjinal dan seluruh lapisan masyarakat desa untuk menyerap aspirasi," ujar Gus Halim.

Gus Halim mengemukakan, setelah rencana kerja desa diputuskan, dilanjutkan dengan membahas Anggaran Pembangunan dan Belanja Desa (APBDes) yang disepakati oleh seluruh peserta Musdes.

"Setelah disepakati, APBDes kemudian ditampilkan di balai desa untuk bisa dilihat dan diakses oleh masyarakat desa untuk mengetahui komponen penggunaan seperti Dana Desa, alokasi Dana Desa hingga hibah," katanya.

Hal itu membuat masyarakat bisa mengevaluasi program yang tercantum dalam APBDes sekaligus mengetahui secara rinci program, lokasi pelaksanaan hingga perkembangan program di desa.

"Ini yang saya katakan, transparansi dalam penyusunan dan evaluasi pengelolaan keuangan ada di desa," tuturnya.

Mendes juga mengatakan Dana Desa bisa digunakan untuk apa saja asalkan berkaitan langsung dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan sumber daya masyarakat. Jika dilaksanakan sesuai peruntukannya dengan administrasi yang jelas, maka tidak perlu khawatir adanya tuduhan korupsi.

"Tidak perlu ragu, kita sudah bekerja sama dengan Kejaksaan dan Polri. Asalkan tidak berniat menyalahgunakan Dana Desa, maka tidak perlu takut. Tidak akan ada kepala desa yang jadi tersangka korupsi Dana Desa jika memang sesuai peruntukan," ucapnya.

Revisi UU Desa

Saat ini, DPR dan pemerintah tengah melakukan pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Gus Abdul mengharapkan pembahasan revisi UU 6/2014 dapat lebih menyejahterakan masyarakat desa.

"Bagi saya yang terpenting adalah masyarakat yang diuntungkan. Pada intinya Kemendes PDTT mendukung perubahan UU Desa," ujar Gus Halim.

Dia mengatakan, perubahan UU Desa tidak hanya soal anggaran desa dan penambahan masa jabatan kepala desa dari enam menjadi sembilan tahun, namun yang penting juga soal aset dan perbatasan desa. ●





APA YANG KAU KEJAR GOLKAR?

Empat kali Pilpres langsung, hanya dua kali Partai Golkar mengajukan Capresnya. Dua Pilpres terakhir, 2014 dan 2019, Golkar tanpa Capres. Pada 2024, apa yang partai berlogo beringin ini ingin kejar?

Dari Rakernas Partai Golkar 2023, belum tampak tanda-tanda Partai Golkar akan mengajukan Capres pada Pilpres 2024. Sedangkan untuk perolehan kursi di parlemen, Golkar menduduki urutan kedua dengan 85 kursi setelah PDIP 128 kursi dan melampaui Partai Gerindra yang meraih 78 kursi meskipun mengajukan ketua umumnya sebagai Capres.

Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar Airlangga Hartarto mengemukakan hasil Rakernas Partai Golkar memberi mandat kepada ketua umum, untuk menentukan calon presiden dan calon wakil presiden pada Pemilu 2024. Menurut dia, ada tiga hasil rumusan Rakernas 2023 yang melibatkan para pimpinan DPD Partai Golkar se-Indonesia.

"Pertama untuk pilpres memberikan mandat kepada ketua umum menetapkan capres-cawapres dan koalisi bersama Partai Golkar," kata Airlangga saat konferensi pers di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Minggu, 4 Juni 2023.

Kesepakatan yang kedua, seluruh DPD dan ormas di Partai Golkar meminta agar sistem proporsional terbuka diterapkan di Pemilu 2024. Oleh sebab itu Airlangga

meminta kepada DPP Partai Golkar untuk terus memperjuangkan sistem proporsional terbuka.

Adapun penerapan sistem pemilu saat ini tengah digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dari sembilan parpol di parlemen, hanya PDI Perjuangan yang sejauh ini setuju sistem pemilu diubah menjadi proporsional tertutup.

"Yang ketiga, terkait dengan pemilu yang saat sekarang Partai Golkar, bakal calon legislatif masih menurut alfabetis. Nah ini diminta untuk pada waktunya dibuat berdasarkan nomor urut. Dan nomor urut itu berbasis kepada PDLT, yaitu prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela," tuturnya.

Lalu, kata dia, sayap pemuda dan wanita di Partai Golkar harus diberikan kesempatan. Khusus wanita, diberlakukan kuota 30 persen. Lebih-lebih, caleg wanita juga harus diberikan kemudahan pada saat kampanye nanti.

"Kemudian, seluruh ketua-ketua DPD, juga seluruh ketua umum ormas hasta karya dan yang didirikan, mendirikan, bertanggung jawab atas kemenangan pileg, pilpres dan pilkada, baik oleh DPP, ketua-

ketua provinsi, ketua-ketua kabupaten/kota dalam seluruh tingkatannya, seluruhnya berkewajiban untuk memenangkan Partai Golkar," jelas Airlangga.

Masing-masing partai politik memi-

liki perilakunya sendiri-sendiri. Demikian pula dengan Partai Golkar. Dari Rakernas 2023, semoga terlihat kisi-kisi yang Partai Golkar kejar di 2024. Meskipun belum se-terperinci PDIP. ●



BORONG PESAWAT TEMPUR KUATKAN PERTAHANAN UDARA

Kementerian Pertahanan berupaya menambah jumlah alat utama sistem persenjataan atau alutsista, khususnya untuk TNI Angkatan Udara, dengan mulai memperbanyak pesawat tempur. Selain membeli sejumlah pesawat tempur dari negara lain, Kementerian Pertahanan juga bekerja sama dengan Korea Selatan membangun pesawat tempur yang diberi nama KF-21 Boramae.

Kementerian Pertahanan merencanakan peremajaan (upgrade/refurbish) dan perbaikan (overhaul/repair) untuk beberapa pesawat TNI AU, di antaranya SU-27/30, F-16, dan Hawk 100/200. Dalam proses yang bersamaan, Kementerian Pertahanan juga membeli pesawat tempur baru Dassault Rafale buatan Dassault Aviation dari Prancis dan F-15 Super Eagle dari Amerika Serikat.

Akan tetapi, tiga unit pesawat baru Dassault Rafale dijadwalkan baru tiba di Tanah

rata usia pakainya (Mirage 2000-5) masih di atas 10 tahun, 10 sampai 15 tahun, karena usia pesawat itu rata-rata 30 tahun. Dan, Qatar itu relatif kecil, sama dengan Jabodetabek, sama Bogor mungkin masih besar Bogor. Jadi, dia (Mirage 2000-5) punya istilahnya jam terbangnya masih muda,” ungkap Prabowo.

Prabowo menambahkan, pembelian 12 unit pesawat tempur Mirage 2000-5 merupakan salah satu bentuk transfer teknologi untuk pilot-pilot TNI AU sebelum nantinya mereka menggunakan pesawat tempur

rage 2000-9 bekas Angkatan Udara Uni Emirat Arab untuk memastikan kesiapan tempur TNI AU dan pertahanan udara Indonesia saat beberapa pesawat tempur TNI AU menjalani masa peremajaan dan perbaikan.

“Emirates (UAE) juga punya Mirage, jenisnya Mirage 2000-9. Ini kami akan segera kirim tim negosiasi. Dan, ini juga kami negosiasi, karena kami harus yakinkan mereka bersedia (pesawat tempurnya) kami akuisisi,” kata Prabowo Subianto.

Prabowo optimistis Indonesia dapat membeli pesawat tempur buatan Dassault Aviation dari Prancis itu, karena hubungan baik Indonesia dan Uni Emirat Arab. “Sekarang ini agak rebutan karena banyak negara lagi butuh. Ya kita Alhamdulillah (punya) hubungan baik dengan Timur Tengah, sama Qatar, sama Emirates (UAE). Jadi kita didahulukan,” kata Prabowo.

Prabowo mengungkapkan adanya pihak yang seolah nyinyir soal pembelian pesawat tempur bekas. Dia menuturkan pemerintah memang terpaksa membeli pesawat tempur bekas, namun dengan kualitas yang masih

melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Apep menilai pembelian alutsista, seperti yang terbaru 12 pesawat Mirage 2000-5 seharga Rp4,7 triliun merupakan harga yang ideal. “Angkanya (harga) masih sangat ideal, terlebih jika kita melihat betapa pentingnya kebutuhan keamanan dan fungsionalnya,” kata Apep dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu, 2 Juli 2023.

Pesawat Tempur KF-21 Boramae

Indonesia telah melakukan kerja sama bidang pertahanan dengan Korea Selatan melalui pengembangan pesawat tempur KFX/IFX (Korea Fighter Xperiment/Indonesia Fighter Xperiment) yang dimulai pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Namun, proyek generasi 4,5 ini terhambat karena Indonesia menunggak pembayaran biaya ongkos produksi, rekayasa teknik dan pengembangan.

Indonesia dan Korea Selatan bekerja sama



Air dalam waktu 36 bulan atau tiga tahun ke depan. Sementara itu, proses pembelian F-15 Super Eagle masih dalam tahap pembahasan surat penawaran (letter of offer and acceptance) dari Pemerintah Amerika Serikat, mengingat F-15 dibeli dengan skema foreign military sales (FMS).

Oleh karena itu, demi memastikan TNI AU selalu siap tempur, Kementerian Pertahanan membeli 12 unit pesawat tempur Mirage 2000-5 bekas Angkatan Udara Qatar.

“Pembelian Mirage ini adalah sebagai suatu interim solution (solusi sementara). Jadi, pesawat-pesawat kita yang sekarang ada sudah sangat tua dan dalam keadaan perlu refurbishment yang cukup besar,” kata Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, akhir Juni lalu.

Rencananya, 12 pesawat tempur Mirage 2000-5 yang dibeli dari Qatar akan dikirim ke Indonesia sekitar 24 bulan setelah kontrak efektif. Pesawat-pesawat itu bakal memperkuat Skadron Udara 1 Lanud Supadio, Pontianak, Kalimantan Barat.

Prabowo menjelaskan, 12 unit Mirage 2000-5 bekas yang dibeli dari Qatar juga memiliki masa jam terbang (flying hours) yang relatif singkat.

“Para ahli kita, kita kirim, kita periksa rata-

baru Dassault Rafale.

Prabowo menjelaskan Mirage 2000-5 dan Dassault Rafale memiliki teknologi kompatibel karena keduanya dibuat oleh perusahaan yang sama, yakni Dassault Aviation dari Prancis.

“Jadi, (Mirage) itu kita pakai. Satu, untuk kekuatan deterrent, untuk interim, sekaligus untuk membiasakan penerbang-penerbang kita dengan teknologi Prancis,” kata Prabowo.

Indonesia membeli 12 unit Mirage 2000-5 beserta perangkat pendukungnya dari Qatar dalam Kontrak Jual Beli Nomor: TRAK/181/PLN/I/2023/AU yang diteken pada 31 Januari 2023. Nilai pembelian pesawat itu sebesar 733 juta euro atau sekitar Rp11,83 triliun dengan penyediaannya perusahaan asal Republik Ceko, Excalibur International A.S.

Prabowo mengatakan pesawat tempur Mirage 2000-5 memang tidak sepenuhnya sama dengan Rafale. Namun, secara sistem Mirage 2000-5 sama dengan Rafale.

Selain Mirage 2000-5 dari Qatar, Prabowo menyebut Kementerian Pertahanan akan mengirim tim negosiasi ke Uni Emirat Arab untuk menjajaki peluang membeli pesawat tempur Mirage 2000-9.

Rencana pembelian pesawat tempur Mi-



baik.

“Jadi kebetulan memang banyak yang seolah-olah nyinyir, seolah-olah ya mau macam-macam, menilai bahwa diomongin pesawat bekas pesawat bekas, ya memang sering terpaksa kita beli pesawat yang tidak baru,” ujarnya.

Prabowo menyebut banyak negara yang masih rebutan membeli pesawat tempur karena situasi global yang dilanda ketegangan. Oleh karena itu, menurutnya, tidak menjadi masalah jika pemerintah membeli pesawat bekas.

“Dan sekarang banyak negara sedang rebutan di mana-mana, karena ketegangan meningkat di mana-mana, saya kira itu jawaban saya,” ujarnya.

Pengamat militer Apep Agustiawan menilai pembelian alutsista oleh Kementerian Pertahanan merupakan strategi yang tepat dan sesuai konstitusi untuk menguatkan pertahanan Indonesia, baik di tatanan regional maupun global.

Pembelian alutsista merupakan bentuk nyata Kementerian Pertahanan dalam melaksanakan fungsi pembangunan kekuatan TNI. Bahkan, fungsi ini merupakan amanah UUD 1945 yang telah mengatur bahwa tujuan negara Indonesia, di antaranya adalah

mengembangkan pesawat tempur generasi 4,5 yang kemampuannya diyakini mendekati pesawat siluman terdepan dunia saat ini. Dalam kerja sama jangka panjang itu, Pemerintah Korea Selatan mendanai 60 persen proyek pengembangan pesawat tempur itu, Pemerintah Indonesia 20 persen, dan Korea Aerospace Industries (KAI) 20 persen.

Indonesia masih menunggak utang sebesar USD671 juta dari total komitmen USD1,3 miliar untuk mendanai proyek gabungan dengan Korea Selatan itu.

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menegaskan dirinya bakal menyelesaikan dalam waktu dekat persoalan tunggakan utang Indonesia dalam proyek kerja sama pembuatan Pesawat Tempur KFX/IFX yang diberi nama KF-21 Boramae.

“Saya kira ini akan selesai dalam waktu dekat karena ini suatu keputusan Presiden,” kata Prabowo di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis, 6 Juli 2023.

Prabowo mengatakan, dia berencana mengupayakan adanya sinkronisasi antara proyek-proyek pembuatan pesawat tempur yang merupakan ranah Kementerian Pertahanan dengan pengaturan anggaran yang menjadi kewenangan Kementerian Keuangan. ●

PERJUANGKAN TAMBAHAN EXIT TOL DI MUBA

Hadirnya jalan bebas hambatan yang melintasi wilayah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) Sumatera Selatan memberi dampak positif dalam berbagai sisi terutama peningkatan ekonomi dan pelayanan transportasi. Dampak yang besar itu membuat Pj Bupati Muba, Apriyadi Mahmud meminta tambahan exit tol yang bisa menuju ke Kota Sekayu, Ibukota Kabupaten Musi Banyuasin.



Untuk mendukung hadirnya jalan tol ini, Pj Bupati Muba H Apriyadi Mahmud bersama Kepala Satuan Kerja Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Provinsi Sumatera Selatan Wandu Saputra memantau progres pembangunan Trase Jalan Tol Bayung Lencir - Tempino Seksi 1 di Desa Senawar Jaya Kecamatan Bayung Lencir.

Jalan tol yang diperkirakan rampung pada pertengahan tahun 2024 tersebut diharapkan dapat memberikan multiplier effect bagi masyarakat Muba, utamanya dalam sektor peningkatan ekonomi.

"Semoga pembangunan jalan tol trans Sumatera melalui Kabupaten Muba sepanjang 131 kilometer yang melintasi 6 kecamatan dan 27 desa sesuai dengan target yang direncanakan dan selesai dengan baik," ujar Pj Bupati Muba.

Dikatakannya, pembangunan Jalan Tol Baleno yang menghubungkan wilayah Bayung Lencir- Tempino Seksi 1 merupakan bagian dari proyek strategis nasional yakni pembangunan Jalan Trans Sumatera dari Bakauheni – Aceh.

Sehingga proyek strategis nasional ini adalah tanggungjawab bersama, bukan hanya pemerintah namun juga seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Musi Banyuasin.

"Atas nama pemerintah tertinggi dan atas nama Pemkab Muba kami mohon dukungan dari semua masyarakat, terutama masyarakat Bayung Lencir, tolong bantu pemerintah untuk sesegera mungkin untuk menyelesaikan Trase Jalan Tol Bayung Lencir- Tempino 1 dan seterusnya. Tanpa dukungan masyarakat tentu ini tidak bisa diselesaikan tepat waktu," ucapnya.

Dalam kesempatan itu Apriyadi meny-

ampaikan bahwa selain mendukung penuh pembangunan proyek strategis nasional, Pemerintah Kabupaten Muba juga mengajukan permohonan agar jalan tol yang melalui Kabupaten Muba diberi nama Ruas Jalan Tol Muba Jaya.

Kemudian penambahan exit jalan tol, yang sebelumnya ada dua yakni di Kecamatan Bayung Lencir, dan Simpang C2 Kecamatan Sungaililin.

Ia meminta untuk exit tol di Simpang C2 Sungai Lilin di geser ke Sinar Tungkal Kecamatan Tungkal Jaya dan ditambah exit tol di Supat Barat Kecamatan Babat Supat supaya bisa lebih dekat diakses dari

ibukota kabupaten, Kota Sekayu.

"Kami mohon ini dipenuhi karena pembangunan jalan tol ini untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan mendekatkan akses masyarakat," tandasnya.

Sementara Kepala Satuan Kerja Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Provinsi Sumatera Selatan Wandu Saputra mengatakan Jalan Tol Bayung Lencir- Tempino Seksi 1 merupakan proyek strategis nasional untuk meningkatkan konektivitas wilayah terutama Sumsel - Jambi.

Panjang Trase Bayung Lencir - Tempino 7,625 KM, dikerjakan PT Adikarya, Waskita, dan PT Jaya Konstruksi, dengan nilai kontrak 1,6 triliun bersumber langsung dari APBN, dan ditargetkan selesai pada Juni 2024.

"Terimakasih atas dukungan yang luar biasa dari Pemerintah Kabupaten Muba, namun kami menuntut lebih, supaya pembebasan lahan bisa selesai 100 persen di akhir Oktober 2023, dan pekerjaan ini ditargetkan paling lambat 30 Juni 2024," kata Wandu.

Percepat Pelaksanaan Ganti Rugi

Progres percepatan pelaksanaan pengadaan tanah trase Jalan Tol Betung (Sp. Sekayu) – Tempino –

Jambi atau Baleno terutama yang masuk di wilayah Kabupaten Muba menjadi perhatian serius Pj Bupati Apriyadi Mahmud.

Bahkan Pj Bupati Apriyadi Mahmud mendesak pihak terkait utamanya Kementerian PUPR dan BPN untuk mempercepat proses pengadaan dan ganti rugi tanah trase jalan tol Betung (Sp.Sekayu) – Tempino – Jambi.

"Mari kita kebut progresnya, Pemkab Muba sangat all out untuk mendorong percepatan realisasi di lapangan. Jadi, saya minta BPN dan Kementerian PUPR juga all out agar progres bisa dikebut maksimal," tegas Pj Bupati Apriyadi Mahmud saat memimpin rapat Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Trase Jalan Tol Betung (Sp.Sekayu) – Tempino – Jambi di Ruang Rapat Serasan Sekate. Ia mengatakan, prinsipnya Pemkab Muba sangat mendorong dan memback up percepatan realisasi di lapangan.

"Kalau ada kendala di lapangan bisa berkoordinasi dan dilaporkan, agar pekerjaan bisa sesuai target," tegasnya.

Sementara, PPK Pembangunan Jalan tol Bayung Lencir- Tempino seksi I Aldino Angga Saputra menyatakan, pihaknya siap membantu Pemkab Muba dalam proses percepatan ganti rugi lahan secara maksimal.

"Untuk upaya percepatan artinya meskipun Penlok (penentuan lokasi) belum terbit, kita supaya mengukur terlebih dahulu kita coba masuk ke lokasi kita ukur dulu, karena di lokasi ini banyak titik pengujian sehingga saat Penlok terbit kita bisa berlari cepat. Harapan kita pelaksanaan pembangunan ini dapat terlaksana dengan baik dan cepat,"pungkasnya. •





KEBUT PERBAIKAN JALAN RUSAK HINGGA KE PELOSOK

Kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan di Bumi Serasan Sekate menjadi konsentrasi utama Pj Bupati Apriyadi Mahmud dalam membangun daerah. Di tahun kedua menahkodai Kabupaten Muba, Pj Bupati Apriyadi terus mengebut perbaikan kerusakan infrastruktur yang belum tuntas.

“Di APBD Perubahan 2023 ini akan kami dorong maksimal untuk menyelesaikan infrastruktur jalan dan jembatan yang rusak karena belum diperbaiki,” tegasnya.

Selain itu, ia juga akan mengucurkan anggaran untuk menambah alat berat untuk kebutuhan menyisir perbaikan infrastruktur jalan di daerah pelosok.

“Jadi kita titik beratkan ke desa-desa pelosok terlebih dahulu yang memang masih minim sentuhan peningkatan infrastruktur,” ungkapnya.

Ia menambahkan, skala prioritas perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan pada APBD Perubahan TA 2023 ini diantaranya di Jirak Jaya, Lalan, dan Kecamatan Lais.

“APBD Perubahan TA 2023 ini kita dorong habis-habisan untuk perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan di beberapa wilayah tersebut, dan juga akan di back up di APBD Tahun Anggaran 2024,” bebernya.

Bertahap, pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan serta jembatan di Kecamatan Lalan terus dibenahi.

Kali ini, menggunakan APBD Tahun

Anggaran 2022 yang lalu, Pj Bupati Apriyadi Mahmud mengucurkan anggaran melalui Dinas PUPR Muba sebesar Rp1,9 Miliar membangun Jembatan Komposit Dusun 1-4 Desa Tri Mulya Agung Kecamatan Lalan.

Usai dibangun terhitung sejak Desember 2022 lalu, akhirnya Pj Bupati Apriyadi Mahmud meresmikan secara langsung Jembatan Komposit Dusun 1-4 Desa Tri Mulya Agung Kecamatan Lalan.



“Alhamdulillah telah selesai pembangunan Jembatan Komposit yang dapat menghubungkan empat dusun di Desa Tri Mulya Agung Kecamatan Lalan, dan hari ini kita resmikan,” ungkap Pj Bupati Apriyadi Mahmud.

Mantan Kadinsos Pemprov Sumsel ini mengungkapkan, di tahun anggaran 2023 ini Pemkab Muba kembali mengucurkan anggaran untuk pembangunan dua jembatan di Kecamatan Lalan.

“Tahun 2023 ini Insya Allah akan ada dua jembatan lagi di Kecamatan Lalan yang akan dibangun. Mohon support dan doa, tidak hanya jembatan tapi Pemkab

Muba akan memprioritaskan peningkatan jalan,” bebernya.

Apriyadi mengaku, tentu tidak hanya persoalan jalan dan jembatan saja, namun warga Lalan juga dihadapkan pada persoalan listrik. Dan saat ini Pemkab Muba sedang berjuang untuk peralihan pengelolaan listrik dari PT MEP ke PLN.

“Saat ini Pemkab Muba sedang berjuang, Insya Allah nanti kita akan terus mendorong agar pengelolaan listrik dari

MEP bisa dialihkan ke PLN. Saat ini kita tinggal menunggu tindak lanjut dari PLN,” urainya.

Kadis PUPR Muba Alva Elan mengungkapkan pembangunan jembatan komposit Dusun 1-4 Desa Tri Mulya Agung Kecamatan Lalan memiliki panjang 40 meter dan lebar 3 meter.

“Pembangunannya sudah selesai Desember 2022 lalu, dengan menelan anggaran Rp1,9 miliar,” urainya.

Ia mengaku, pembangunan jembatan dan jalan di Kecamatan Lalan di Tahun Anggaran 2023 kembali dianggarkan untuk kebutuhan masyarakat Lalan.

“Sesuai arahan pak Bupati Apriyadi untuk terus secara bertahap melakukan percepatan pembangunan infrastruktur di Kecamatan Lalan,” tukasnya.

Pemkab Muba juga mulai menyiapkan rencana pembangunan jalan antar desa dengan total anggaran Rp 4 miliar untuk delapan desa penghubung.

Pembangunan jalan penghubung ini demi memudahkan lalu lintas barang dan jasa warga delapan desa. Saat ini, masyarakat masih terkendala ketika bergajian. Maklum, daerah eks transmigrasi dengan kontur tanah gambut ini sangat rentan susah dilalui ketika musim hujan. Kendaraan sering terjebak lumpur, susah melintas akibat roda lengket dengan tanah.

Bahkan untuk membangun infrastruktur ini, Pj Bupati Apriyadi Mahmud mendapatkan bantuan dari Presiden Jokowi untuk perbaikan jalan sebesar Rp60 miliar melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah.

“Tahun ini kita dapat Rp60 Miliar untuk peningkatan atau perbaikan jalan Simpang Gardu-Tanjung Agung, untuk proses lelang pekan depan sudah dimulai,” ungkap Kadis PUPR Muba, Alva Elan.

Ia merinci, adapun penanganan efektif yang akan dilakukan yakni panjang 7.500 meter dan lebar 7 meter dengan bangunan pendukung saluran drainase dengan batu kali untuk titik tertentu.

Ia menjelaskan, untuk proses pengerjaan dilakukan oleh Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) Wilayah V.

“Usulan berikutnya sudah diusulkan pak Bupati Apriyadi untuk perbaikan di empat ruas jalan di Muba dengan estimasi anggaran Rp160 miliar,” bebernya.

Pj Bupati Apriyadi Mahmud mengatakan ia akan terus maksimal melakukan perbaikan infrastruktur jalan di Muba.

“Tentu kita berupaya terus dengan tidak hanya mengandalkan dana APBD, bantuan pemerintah pusat tentu sangat membantu mengurangi kerusakan jalan Kabupaten,” ujarnya. ●

JAGA PARTISIPASI PEMILIH TANPA KTP ELEKTRONIK

Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta pemerintah untuk serius menindaklanjuti temuan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) terkait pemilih tanpa kartu tanda penduduk elektronik (KTP-e) yang berpotensi tidak bisa menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2024.

Bawaslu menemukan sebanyak 4.005.275 data pemilih tanpa KTP elektronik pada Pemilu 2024 yang akan digelar pada 14 Februari tahun depan. Sekitar 4 juta pemilih potensial tanpa KTP-e itu merupakan pemilih baru yang akan berumur 17 tahun pada 14 Februari 2024 dan pemilih yang sudah berusia 17 tahun, tetapi belum melakukan perekaman KTP elektronik. Kedua kelompok tanpa KTP-e itu belum dimasukkan ke daftar pemilih oleh KPU.

Menurut Bamsoet, sapaan Bambang Soesatyo, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) perlu kembali menggenjotkan dan mengintensifkan perekaman data kependudukan. Hal itu bisa dilakukan baik dengan mengoptimalkan layanan di kantor Dukcapil maupun layanan jemput bola atau door to door.

Bamsoet berharap upaya-upaya tersebut dapat mempermudah akses keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan Pemilu 2024 yang mewajibkan pemilihnya menggunakan atau memiliki KTP elektronik.

Bamsoet juga meminta kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk meningkatkan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil guna memastikan layanan atau fasilitas perekaman hingga penerbitan KTP elektronik berjalan baik dan optimal.

"Pasalnya, fasilitas maupun layanan tersebut termasuk salah satu hal penting dalam menunjang suksesnya Pemilu 2024 mendatang," kata Bamsoet, Selasa, 4 Juli 2023.

Bamsoet juga meminta KPU mendorong dan mengimbau masyarakat untuk segera mendaftarkan diri ke kantor pemerintah setempat untuk mengurus KTP elektronik. Sebab, tanpa kepemilikan KTP elektronik, masyarakat tidak bisa mencoblos pada Pemilu Serentak 2024, sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 348 ayat 1 Undang-Undang Pemilu.

Dia pun meminta komitmen pihak-pihak terkait untuk terus berusaha memastikan setiap warga negara Indonesia memiliki akses penuh untuk menggunakan hak pilihnya pada pada Pemilu mendatang.

Bamsoet juga meminta Polri mengatur strategi dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) menjelang dan selama Pemilu Serentak 2024. Hal terse-

but berkaca dari polarisasi masyarakat saat Pemilu 2019. Kala itu, polarisasi ditandai dengan munculnya berbagai kelompok dengan istilah-istilah tertentu yang berpotensi memecah persatuan masyarakat.

"Meminta kepolisian mengatur strategi dalam menjaga stabilitas kamtibmas menjelang dan selama Pemilu 2024 nanti, guna mencegah terulangnya kembali polarisasi masyarakat pada masa tersebut (Pemilu 2019)," kata Bamsoet.

Selain itu, dia juga meminta kepolisian berkoordinasi dengan penyelenggara pemilu guna memastikan penyelenggaraan Pemilu 2024 berjalan secara sehat dan terhindar dari polarisasi di kalangan masyarakat.

"Meminimalkan semua celah yang dapat memicu polarisasi masyarakat menjelang dan selama Pemilu 2024," tambahnya.

Dia juga meminta Pemerintah, melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), KPU, Bawaslu, serta Polri untuk menjaga ketertiban dan keamanan di media sosial maupun jejaring internet. Hal tersebut bertujuan untuk mencegah penyebaran informasi, pemberitaan, maupun tayangan yang dapat memicu konflik dan menyebabkan polarisasi

di kalangan masyarakat selama penyelenggaraan Pemilu 2024.

"MPR meminta Kominfo meminimalkan tayangan di media yang mengarah pada pergerakan massa, yang memicu terjadinya polarisasi masyarakat, utamanya di dunia online," jelasnya.

Dia pun mengingatkan masyarakat untuk tidak mudah terhasut oleh propaganda, informasi, ajakan, kontroversi, maupun hal-hal lain yang memicu terjadinya polarisasi masyarakat.

"Tetap mengemban nilai baik masyarakat Indonesia, seperti ramah tamah, tinggi persaudaraan, menghormati keberagaman, menjaga keberagaman, serta menjaga persatuan dan kesatuan," ujarnya.

Koordinasi

Wakil Ketua DPR, Abdul Muhaimin Iskandar, juga meminta KPU untuk berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) guna mensinkronisasikan DPT dengan data penduduk demi menyelamatkan hak suara jutaan pemilih baru.

"Mumpung masih ada waktu, saya kira semua pemangku kepentingan terkait seperti KPU dan juga Kemendagri perlu duduk bersama, koordinasi dan mencari solusi untuk 4 juta DPT itu," kata Cak Imin, sapaan karib Muhaimin Iskandar, di Jakarta, Rabu, 5 Juli 2023.

Cak Imin meminta pemerintah untuk segera menindaklanjuti temuan Bawaslu terkait 4 juta DPT yang belum memiliki KTP elektronik agar dapat ikut berpartisipasi dalam

pemilu.

"Saya minta pemerintah segera menindaklanjuti temuan Bawaslu, 4 juta DPT ini tanpa KTP-e ini bukan data sedikit, jadi betul-betul cermat diatasi," ujarnya.

Selain itu, Cak Imin meminta KPU untuk mengantisipasi penambahan atau pengurangan data pemilih, mengingat data yang disebutkan oleh Kemendagri bersifat dinamis serta masih adanya waktu hingga dua tahun ke depan.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga mengingatkan setiap penyelenggara pemilu untuk memaknai banyaknya masyarakat yang akan berpartisipasi menjadi pemilih sebagai momentum untuk meningkatkan penggunaan hak suara dalam pemilu mendatang.

"Semakin banyak partisipasi masyarakat, tentu saja semakin bagus kualitas Pemilu kita. Ini artinya demokrasi tegak lurus dan berjalan sesuai cita-cita reformasi. Jadi, saya tekankan penyelenggara Pemilu harus menjamin betul hak pilih kaum muda kita," kata dia.

Pengaruh Hak Pilih

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Betty Apsilon Indroos, memastikan pemilih yang belum memiliki KTP elektronik, namun telah berusia 17 tahun, tetap bisa menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara Pemilu 2024 dengan menunjukkan kartu keluarga (KK).

"Untuk yang belum 17 tahun dia masih bisa gunakan kartu keluarga. Misalnya, anak saya, Aqila, NIK-nya ada, itu yang akan ditunjukkan," ujar Betty.

Hal itu juga diaminai oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Teguh Setyabudi, yang memastikan pemilih pemula atau pemilih yang telah berusia 17 tahun pada hari pemungutan suara Pemilu 2024 akan mendapatkan KTP elektronik.

"Nanti, setiap mereka yang non-KTP elektronik (pemilih pemula yang belum memiliki KTP elektronik pada saat ini), yang umurnya 17 tahun pada 14 Februari 2024 (hari pemungutan suara Pemilu 2024), insya Allah akan dapat KTP elektronik," kata Teguh kepada wartawan di Jakarta, Rabu, 5 Juli 2023.

Teguh menyampaikan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tingkat kabupaten/kota sebenarnya sudah berupaya mempermudah perekaman KTP elektronik bagi para pemilih pemula dengan cara jemput bola, yaitu mendatangkan petugas perekaman KTP elektronik ke sekolah-sekolah.

Target dari perekaman KTP elektronik adalah para pelajar yang berusia 16 tahun, sehingga saat mereka berusia 17 tahun, maka KTP elektronik dapat segera diserahkan. ●





RUU DESA DUKUNG KADES

Dana Desa Naik Jadi 20 Persen

Rapat Pleno Badan Legislasi (Baleg) DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Kedua UU 6/2014 tentang Desa untuk menjadi RUU usulan inisiatif DPR. Rancangan tersebut akan dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan menjadi RUU inisiatif DPR.

Ketua Badan Legislasi DPR, Supratman Andi Agtas, menyampaikan penyusunan Naskah Akademik (NA) dan RUU yang dilakukan Panja guna mendukung perkembangan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis.

Sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Serta untuk menjawab dinamika dan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, dan kehidupan ketatanegaraan sebagaimana yang diputuskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi.

Menurut Supratman, berdasarkan itu, hal hal yang diatur dalam RUU, antara lain Pasal 26 ayat (3) tentang penambahan hak kepala desa untuk menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah, mendapat jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan dan mendapatkan tunjangan purnatugas satu kali di akhir masa jabatan.

Penyisipan satu pasal di antara Pasal 34 dan Pasal 35 yakni Pasal 34A tentang jumlah calon kepala desa perubahan Pasal 39 terkait masa jabatan kepala desa menjadi sembilan tahun paling banyak dua kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Perubahan Pasal 56 tentang masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjadi sembilan tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama yang pengisiannya dilakukan secara demokratis dengan memperhatikan 30 persen keterwakilan perempuan.

Pasal 72 tentang alokasi anggaran dana desa sebesar 20 persen dari dana transfer daerah. Penyisipan satu pasal di antara Pasal 72 dan Pasal 73, yakni Pasal 72A, tentang pengelolaan dana desa untuk peningkatan kualitas masyarakat desa.

Pasal 74 tentang insentif yang diberikan kepada rukun tetangga/rukun warga sesuai kemampuan keuangan daerah.

Pasal 79 ayat (2) huruf a tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu sembilan tahun.

Setiap fraksi dalam Panitia Kerja Badan Legislasi DPR sepakat bahwa Dana Desa melalui Alokasi Transfer Daerah harus ditingkatkan. Kesepakatan ini akan menjadi tumpuan bagi parlemen untuk mewujudkan desa di Indonesia secepatnya bisa bertransformasi menjadi lokomotif pertumbuhan negara. Maka dari itu, Panja Revisi RUU Desa Baleg DPR membahas perubahan pasal 72 dalam UU 6/2014 tentang Desa.

Supratman Andi Agtas menegaskan kepada setiap fraksi dalam memberikan masukan dan aspirasi agar mengedepankan keberpihakan terhadap desa. Hal ini menjadi krusial supaya pembahasan perubahan pasal tersebut terlaksana secara adil dan proporsional.

"Kita mau memberi afirmasi ini kepada desa sebagai lokomotif pertumbuhan ke depan. Kalau kita berharap ke sana, mencegah migrasi desa ke kota, maka alokasi dana desa itu harus besar supaya pertumbuhannya bisa maksimal. Ini menjadi wujud nyata keberpihakan kita kepada

desa," ungkap Supratman saat memimpin Rapat Panja Penyusunan RUU tentang Perubahan Kedua atas UU 6/2014 tentang Desa di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin, 3 Juli 2023.

Anggota Baleg DPR, Desy Ratnasari yang mewakili Fraksi PAN, menyatakan, mendukung penambahan Alokasi Dana Desa per tahun secara terukur sesuai dengan kemampuan APBN. Terlepas dari adanya perbedaan perspektif mengenai porsi penambahan anggaran, dia berharap aspirasi dan masukan yang disampaikan memberikan manfaat baik untuk masyarakat desa.

Wakil Ketua Baleg DPR, Achmad Baidowi, menekankan perhitungan porsi penambahan anggaran diperhitungkan secara adil dan proporsional. Dirinya berharap pembahasan tersebut dibahas dengan seksama agar tidak menimbulkan kecemburuan sekaligus konflik sosial dalam penempatannya nanti.

Achmad Baidowi menyampaikan beberapa poin yang menjadi pembahasan pada revisi RUU tersebut. Salah satunya terkait masa jabatan kepala desa dari

enam tahun jadi sembilan tahun untuk dua periode.

"Yang paling krusial itu terkait dengan masa jabatan kepala desa itu sebenarnya tidak ada penambahan masa jabatan. Kalau di Undang-Undang No 6/2014 itu, masa jabatan kepala desa 6 tahun bisa 3 periode. Sementara revisi UU baru ini, 9 tahun kali 2 periode. Sama 18 tahun, cuma perodesasinya kita ubah," ujar Achmad Baidowi.

Politisi dari F-PPP ini menjelaskan, penambahan masa jabatan dibutuhkan untuk memberi waktu konsolidasi kepada para kepala desa. Mengingat, pemilihan kepala desa umumnya berdampak konflik sosial berkepanjangan. Sehingga masa jabatan enam tahun dinilai tidak cukup bagi para kepala desa untuk menyelesaikan ketegangan serta melaksanakan program pembangunan.

"Kalau 6 tahun Pilkada itu dirasa belum cukup waktunya untuk menghilangkan trauma-trauma itu. Dan kepala desanya belum membangun masih sibuk konsolidasi sudah memasuki masa habis jabatan. Jadi, kalau 9 tahun mereka masih ada waktu konsolidasi," jelas Baidowi.

Selain itu, Baidowi juga menyampaikan persetujuan Panja terhadap penambahan alokasi dana desa menjadi 20 persen dari total transfer daerah. Baidowi menjelaskan, kenaikan dana desa diharapkan bisa mendorong pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di tingkat desa.

Adapun dana transfer daerah terdiri atas enam komponen, yakni dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana perimbangan, dana otonomi khusus, dana keistimewaan dan dana desa.

"Soal kemudian apakah 20 persen ini disetujui pemerintah itu nanti dalam pembahasan. Setidaknya kami mengajukan usulan sebagaimana aspirasi yang kami dapatkan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi di tingkat desa. Tentu pembahasannya nanti akan diformulasikan bersama pemerintah," ungkapnya. ●



Meutya Viada Hafid

MENEMBUS DOMINASI LELAKI POLITISI

Hanya tiga perempuan atau 10 persen saja dari 30 anggota DPR RI terpilih di Sumatera Utara pada 2019. Salah satunya Meutya Viada Hafid, yang sudah berpengalaman kalah-menang dalam pemilihan politik demokratis.

Duduk di kursi DPR pertama kali sebagai anggota pengganti antarwaktu (PAW) pada 2010, Meutya pernah gagal di pemilihan legislatif karena dominasi lelaki politisi di Sumatera Utara umumnya. Malah ia juga gagal mengikuti pemilihan kepala daerah sebagai calon Wali Kota Binjai pada 2010.

Toh amanat sebagai anggota DPR PAW pada 2010 ia emban dengan baik sehingga di Pemilu Legislatif 2014 ia berhasil mempertahankan kursinya di parlemen dari Daerah Pemilihan Sumut I yang meliputi Kota Medan, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Deli Serdang, dan Kota

dan aksi nyata Jokowi membuat hubungan Indonesia dan Australia mengalami penguatan beberapa tahun terakhir ini.

“Presiden Joko Widodo menunjukkan kepemimpinan yang konkret dalam hubungan Indonesia-Australia. Kedua negara berhasil mengimplementasikan berbagai kerja sama strategis; di antaranya Comprehensive Strategic Partnership (CSP) yang berisi lima pilar penting; kerja sama ekonomi dan pembangunan, menghubungkan orang, keamanan, kerja sama maritim, dan stabilitas dan kemakmuran Kawasan Indo-Pasifik,” kata Meutya Hafid, Rabu, 7 Juli 2023.

Indonesia-Australia yang meningkat di era Joko Widodo mencapai US\$12,64 miliar pada 2021 yang merupakan rekor tertinggi sejak tahun 1989. Dengan nilai perdagangan tersebut, Australia menjadi mitra dagang terbesar ke-10 bagi Indonesia dengan kontribusi sekitar 2,95 persen terhadap total nilai perdagangan barang Indonesia,” ujarnya.

Sebelumnya, partainya, Partai Golkar memberikan penghargaan berupa Golkar Media Awards 2023 kepada Meutya Hafid sebagai kader Partai Golkar terpopuler 2023 bersama kader-kader separtainya yang mendapat penghargaan di bidang lainnya. Golkar Media Awards sejatinya merupakan bentuk apresiasi Partai Golkar kepada kader-kader yang telah bekerja keras memperjuangkan kesejahteraan rakyat yang menjadi perhatian media selama ini.

“Acara ini untuk mengapresiasi kader-kader Golkar dimanapun berada, baik dari tingkat kabupaten kota maupun pusat serta yang ada di pemerintahan yang selama ini aktif mensosialisasikan kerja nyata Partai Golkar dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat,” kata

Ketua Media dan Penggalangan Opini (MPO) DPP Partai Golkar, Meutya Hafid kepada wartawan usai menghadiri acara penghargaan Golkar Media Awards 2023 yang diselenggarakan Kabar Golkar, di Jakarta, Sabtu, 10 Juni 2023.

Meutya mengungkapkan Partai Golkar melihat sosialisasi di sosial media memiliki potensi besar untuk mencapai peningkatan pemilih Golkar khususnya di kalangan milenial. Pemilih pemula, lanjut Meutya Hafid, adalah sasaran utama bermedsos, apalagi pengguna medsos mencapai 80 persen dari penduduk Indonesia. “Ini sangat efektif. Kita harus menggunakan cara-cara kampanye yang modern melalui sosmed. Kader Golkar didorong untuk aktif di medsos,” kata Meutya Hafid.

Ia juga berharap kader-kader Partai Golkar yang aktif di sosmed, untuk menjadikan sosmed sebagai media yang mencerahkan dan bukan menampilkan berita hoaks. “Kita berikan pesan-pesan yang damai bukan perpecahan dengan juga menampilkan kerja-kerja nyata Golkar, bukan menonjolkan aksi serang menyerang,” tegasnya.

Acara penghargaan ini juga dimaksudkan agar para kader Golkar di seluruh Indonesia untuk terus aktif dan meningkatkan sosialisasi melalui medsos. “Jadi di acara ini sekali lagi, kita ingin kader yang mendapat penghargaan ataupun belum dapat, terus aktif di medsos khususnya untuk meningkatkan suara partai,” ujarnya. ●



Tebing Tinggi). Begitu pula pada Pemilu Legislatif 2019

Sebagai legislator ia terbilang sarat prestasi. Antara lain menjadi Ketua Komisi I DPR yang membidangi masalah pertahanan, luar negeri, serta komunikasi dan informatika. Paling tidak, bidang-bidang itu memiliki titik temu dengan karir Meutya sebelumnya sebagai wartawan dan presenter Metro TV yang pernah meliput perang bahkan sempat menjadi sandera.

Tak mengherankan jika ia juga piawai di bidang hubungan internasional, urusan luar negeri. Salah satu contohnya adalah pengamatannya mengenai hubungan Indonesia dengan negeri tetangga Australia yang mengalami pasang-surut dalam lintasan waktu. Nah, dalam hal ini Meutya justru memuji hubungan Indonesia dan Australia selama kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Meutya menyebut kedua negara mengalami penguatan hubungan yang baik di era Presiden Jokowi. Menurut dia, kepemimpinan

Perempuan kelahiran Mei 1978 itu menyampaikan pandangannya dalam Forum Indonesia-Australia yang diselenggarakan secara hybrid oleh University of Melbourne, Australia, bertema ‘Australia-Indonesia Relations in the Twilight of the Jokowi Years’. Selain Meutya, hadir juga Dubes Australia untuk Indonesia tahun 2018-2021, Gary Quinlan, sebagai narasumber.

Politisi Partai Golkar ini menekankan pula pentingnya kepemimpinan yang kuat dan mempunyai visi ke depan dalam peningkatan kerja sama bilateral Indonesia-Australia. Menurut Meutya, Jokowi berhasil menerapkan kerja sama yang berdampak dengan Australia.

“Presiden Jokowi berhasil mengimplementasikan kerja sama menjadi suatu hasil nyata yang bisa berdampak positif bagi kedua negara. Sebagai contoh, jika melihat data perdagangan



Memiliki dukungan kuat di daerah pemilihan adalah salah satu kunci Saleh Partaonan Daulay, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional di DPR RI dan juga salah satu Ketua DPP PAN. Dukungan itu tampak jelas dalam kunjungan terbaru Saleh di daerah pemilihannya, Sumatera Utara II yang meliputi 16 kabupaten dan tiga kota.



Saleh Partaonan Daulay

DUKUNGAN KUAT DI TANAH KELAHIRAN

Yang 17 Kabupaten itu adalah Labuhanbatu, Labuhanbatu Selatan, Labuhanbatu Utara, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Toba, Samosir, Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Nias, Nias Selatan, Nias Utara, dan Nias Barat. Sedangkan tiga kota di Dapil Sumut II adalah Kota Gunungsitoli, Kota Sibolga, dan Kota Padang Sidempuan.

Kali ini Saleh datang ke Desa Tambangan Tonga, Kecamatan Tambangan, Mandailing Natal (Madina) pada Jumat, 7 Juli 2023. Beriringan dengan masa reses (periode tanpa rapat kerja di DPR berganti dengan kunjungan ke dapil untuk menyerap aspirasi).

Toh yang mencolok adalah sambutan meriah yang tampak dalam kunjungan kali ini, sebagaimana acaranya yang berlangsung di lapangan sepakbola desa Tambangan Tonga. Ratusan warga Desa Tambangan Tonga dan warga beberapa desa di Kecamatan Tambangan, tumpah ruah ke lapangan bola itu.

Salah satu sambutan untuk Saleh Daulay beserta rombongan adalah tarian Tor-tor selamat datang dari murid-murid SDN Tambangan Tonga. Selain itu, Saleh Daulay juga sempat berjoget bersama dengan puluhan masyarakat yang tampak antusias menyambut reses politisi PAN ini.

Dalam kesempatan itu pula, tokoh Masyarakat Tambangan Tonga Marwansyah Lubis SPd menyampaikan aspirasi tentang peningkatan pelayanan dan fasilitas di Puskesmas Tambangan. "Kami berharap Bapak membenahi

Puskesmas Tambangan. (Agar) ketika kami sakit, tidak perlu susah-susah lagi harus dibawa ke RSUD Panyabungan (ibu kota Madina). Kami cukup berobat ke Puskesmas," ujarnya

Menanggapi aspirasi ini, Saleh Partaonan Daulay menjelaskan pelayanan kesehatan di desa perlu dibenahi agar masyarakat tidak merasa dianaktirikan. "Keluhan akan kita teruskan ke Dinas Kesehatan Madina untuk menambah dokter dan membenahi fasilitas Puskesmas Tambangan. Hari ini juga hadir bersama kita Direktur Politeknik Kesehatan (Poltekkes) Medan. Berharap Ibu (Rektor) juga mengirimkan mahasiswanya untuk PKL di Puskesmas Tambangan agar mereka tau bagaimana menghadapi

masyarakat seperti ini jika sakit," ujarnya di hadapan warga beserta rombongan termasuk Direktur Poltekkes Medan RR Sri Arini Rinawati.

Ketua Fraksi PAN DPR RI ini menegaskan, pelayanan kesehatan di desa-desa memang perlu dibenahi dan jangan dianaktirikan pemerintah pusat atau Jakarta, terutama untuk wilayah Mandailing Natal. "Supaya tahu bahwa tempat kita ini butuh perhatian dari Jakarta. Jangan sampai orang berpikir kita ini bukan Indonesia," ungkap Saleh.

Menurut dia, bumi Madina adalah bumi atau kampung para pejuang mulai dari masa penjajahan Belanda. Madina, sambung Saleh, tidak pernah ingin merdeka dari Indonesia.

sia, dan warga Madina adalah masyarakat yang cinta NKRI.

"Karena itu kita butuh perhatian dari Jakarta. Supaya daerah ini lebih meningkat kesejahteraannya," tegas mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah ini.

Ia pun mengemukakan sangat mengenal kondisi geografis dan demografis Madina. Namun, apapun kondisinya, Saleh memacu motivasi warga agar tak berhenti pada keluhan, tapi juga berusaha mengatasi masalah.

"Janganlah kalian cerita susah pada saya. Harga getah (karet) turun, harga sawit turun. Tidak punya ladang sawah. Saya tahu itu. Saya tahu penderitaan kesusahan masyarakat. Karena saya dari keluarga susah," jelasnya.

Menurut Saleh Daulay, kemiskinan di masyarakat bisa berubah dengan pendidikan. Dengan pendidikan akan bisa meningkatkan taraf hidup seseorang. Saleh pun menceritakan pengalamannya.

Bahwa dia dahulunya berasal dari keluarga susah. Namun dengan kerja keras menuntut ilmu, dia pun berhasil meraih S1, S2 hingga S3.

Tercatat, setelah menamatkan pendidikan di USU pada 1997, Saleh Daulay melanjutkan kuliah Pascasarjana di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada 1998. Ia juga mengambil program pascasarjana Universitas Indonesia, jurusan Filsafat.

Pada 2000, ia diterima sebagai dosen di IAIN Raden Fatah Palembang. Pada tahun yang sama, Saleh Daulay melanjutkan pendidikannya ke jenjang S-3 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Tidak berhenti di situ, Saleh Daulay juga mendapat kesempatan untuk mengenyam pendidikan di Colorado State University, Amerika Serikat berkat beasiswa Ford Foundation. •



Pertamina Investor Day 2023

WUJUDKAN NILAI PASAR USD100 MILIAR

Pertamina berupaya untuk membangun networking antara Pertamina Holding, Subholding, anak perusahaan, dan afiliasinya dengan para potensial investor maupun partner. Sehingga diharapkan bisa terjalin kolaborasi yang menghasilkan mutual benefit bagi kedua belah pihak.

Untuk itu, Fungsi Investor Relations Direktorat Strategi, Portfolio dan Pengembangan Bisnis (SPPU) Pertamina menyelenggarakan Pertamina Investor Day 2023 di Ballroom Grha Pertamina, Jakarta, 3 Juni 2023.

Kegiatan ini dihadiri oleh kurang lebih 200 peserta yang hadir secara offline maupun daring. Para peserta terdiri dari para bonholders, investor, sektor perbankan, lenders, rating agency, business partner, hingga potential partner Pertamina.

VP Investor Relations, Juferson Victor Mangempis, menyampaikan, guna mencapai aspirasi Pertamina mencapai nilai pasar USD100 miliar, pihaknya membutuhkan kolaborasi dan kegiatan ini digelar untuk membangun network di Pertamina Group, sehingga bisa terjalin suatu kolaborasi.

"Pertamina memiliki aspirasi luar biasa untuk mencapai nilai pasar USD100 miliar dan tentunya hal tersebut tidak dapat dilakukan hanya oleh Pertamina sendiri, maka Pertamina membutuhkan investor dan juga para," ujarnya.

Menurut Juferson, Pertamina Investor Day 2023 bertujuan mempertemukan para partner dan investor yang memang selama ini sudah bekerja sama dengan Pertamina. Sehingga mereka bisa mendapatkan informasi yang lebih banyak dan langsung dari direksi Pertamina.

Kegiatan ini disambut baik oleh Direktur Strategi Portofolio dan Pengembangan Bisnis (SPPU) Pertamina, A Salyadi Dariah Saputra. Dia mengatakan bahwa Pertamina memiliki berbagai strategi inisiatif yang membutuhkan dukungan dan kolaborasi dari para partner dan investor.

"Kami memiliki berbagai strategi inisiatif untuk masa mendatang. Hal ini tidak bisa hanya kami lakukan sendiri dan tentunya membutuhkan kolaborasi. Jadi, menurut saya kegiatan ini sangat penting bagi Pertamina agar bisa berbagi dengan semua partner dan investor yang hadir berupa opportunity partnership di masa mendatang. Diharapkan hal ini bisa membuka kesempatan kerja sama, sekaligus membuat semua yang hadir di kegiatan ini bisa memahami Pertamina lebih baik lagi," ujarnya



Salyadi juga menjelaskan mengenai transformasi Holding dan Subholding, Anak Perusahaan dan Afiliasi di Pertamina, sehingga diharapkan semua partner dan investor bisa menjalin komunikasi langsung satu dengan lainnya.

"Partnership dan kolaborasi sangat penting bagi kami, nanti juga ada site visit langsung ke fasilitas Pertamina Geothermal Energy di Kamojang dan fasilitas Kilang Pertamina Internasional di Cilacap, sehingga semuanya bisa melihat secara langsung bahwa komitmen Pertamina tidak hanya di bidang oil and gas, tapi juga di aspek renewable energy," terangnya.

Direktur Keuangan Pertamina, Emma Sri Martini, juga mengapresiasi Pertamina Investor Day 2023 dengan meyakini bahwa transformasi yang dilakukan Pertamina sejauh ini diharapkan bisa menghasilkan output nyata bagi Pertamina.

"Pertamina telah melakukan transfor-

masi dan saat ini memiliki 6 Subholding. Hal ini diharapkan semakin memudahkan terjalinnya kolaborasi dengan investor atau partner. Melalui kegiatan ini diharapkan Pertamina bisa sukses mendapatkan output dan ada follow up setelah kegiatan ini," ungkap Emma.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Fadjar Djoko Santoso, menegaskan komitmen Pertamina dalam pengembangan bisnis dan senantiasa membuka peluang untuk kerja sama dalam mewujudkan kolaborasi yang bersifat mutual benefit dengan mitra bisnis.

"Kami membuka peluang untuk berkolaborasi dan mengajak mitra Pertamina untuk semakin solid dan berkembang bersama untuk mencapai nilai pasar USD100 miliar," kata Fadjar.

Kegiatan ini pun disambut baik oleh para peserta salah satunya Direktur Marketing & Operasi PT Pertamina Training & Con-

sulting PTC Indah Kurnianingsih.

"Pertamina Investor Day 2023 ini menjadi ajang yang sangat baik karena mempertemukan antara Pertamina, termasuk di dalamnya PTC, agar kami bisa bertemu dengan partner ataupun investor dalam usaha kami meng-enlarge skill bisnis. PTC sendiri ikut sebagai participant karena memang di tahun ini kami menargetkan dapat meningkatkan scale pasar kami ke pasar non-captive. Kami menyambut hangat para investor untuk bersama kami berkolaborasi tumbuh dan berkembang bersama," ucap Indah.

Dalam Pertamina Investor Day 2023 ini juga dilaksanakan exhibition yang berisikan ESG Showcase Pertamina, serta booth Subholding dan Anak Perusahaan Pertamina mulai dari Pertamina Hulu Energi (PHE), Pertamina Geothermal Energy (PGE), PT Pertamina Patra Niaga (PPN), Pertamina New & Renewable Energy (PNRE), Pertamina International Shipping (PIS), PT Kilang Pertamina Internasional (KPI), Pertamina Gas Negara (PGN), Patra Jasa, Tugu Insurance, Pertamedika IHC, Pelita Air Services, Pertamina Training and Consulting (PTC) dan lainnya.

Melanjutkan rangkaian Pertamina Investor Day 2023, Pertamina mengajak para investor untuk mengunjungi lokasi kerja perusahaan, yaitu Kilang Pertamina Cilacap dan Pertamina Geothermal Kamojang, Selasa, 4 Juli 2023.

Kegiatan tersebut dilakukan untuk memperkenalkan lini bisnis Pertamina hingga ke subholding dan anak usaha subholding. Setelah bertransformasi, Pertamina sebagai holding bersama dengan subholding, anak perusahaan dan afiliasi diharapkan dapat mendongkrak reputasi. ●



KOLABORASIKAN RITEL MODERN DAN UMKM

Kementerian Perdagangan mendukung kemitraan antara grosir modern dengan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yaitu toko/warung tradisional. Kemitraan tersebut tentunya dapat menggerakkan dan memajukan UMKM Indonesia. Upaya tersebut, salah satunya dilakukan oleh Indogrosir.

“Saat ini Kementerian Perdagangan sedang berupaya mendorong peningkatan daya saing toko/warung tradisional. Salah satunya melalui kemitraan antara grosir modern dengan toko/warung tradisional. Untuk itu, Kemendag mengapresiasi upaya yang telah dilakukan Indogrosir sebagai komitmen memajukan UMKM Indonesia,” kata Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan saat menghadiri Gathering Member Mitra UMKM Indogrosir di Jakarta, Sabtu 8 Juli 2023.

Menurut Zulhas, melalui kemitraan dengan grosir modern, warung akan mendapatkan banyak keuntungan, antara lain jaminan pasokan barang dengan harga yang kompetitif; pendampingan usaha; dukungan manajemen ritel yang modern; digitalisasi pembayaran melalui QRIS; serta penjualan produk-produk digital seperti pulsa, token listrik, dan bayar tagihan.

Zulhas menjelaskan, toko/warung tradisional sebagai salah satu bentuk UMKM masih menjadi kekuatan ekonomi rakyat paling riil dan sangat berpotensi memberikan dampak yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan ekonomi nasional.

Berdasarkan data dari Eruromonitor 2021, dari 3,61 juta ritel yang ada di Indonesia, 3,57 juta di antaranya berbentuk toko/warung tradisional.

“Upaya pemberdayaan yang dilakukan Kemendag untuk peningkatan daya saing toko/warung tradisional antara lain dilakukan melalui penyediaan pasokan barang, pendampingan usaha, digitalisasi warung, dan bantuan permodalan melalui kemitraan,” ungkap Zulhas.

Sementara itu, UMKM memiliki kontribusi besar bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sebanyak 65,46 juta UMKM Indonesia telah berkontribusi sebesar 60 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). UMKM mampu menyerap 117 juta pekerja atau 97 persen dari total tenaga kerja yang ada.

Dengan mempertimbangkan besarnya potensi UMKM di dalam negeri tersebut, Kemendag mendorong kolaborasi dalam membangun ekosistem bisnis UMKM melalui empat pilar, yaitu UMKM yang terbuka terhadap perubahan, inovatif, dan punya kemauan berkembang; lokapasar (marketplace) yang bersinergi dengan UMKM; ritel dan pemasok modern yang berperan memberikan akses kemitraan; dan lembaga pembiayaan atau perbankan.

Zulhas menegaskan, pada 2023, Kemendag akan tetap berkomitmen mendorong pelaku usaha di berbagai wilayah melalui berbagai program seperti pemberdayaan toko/warung tradisional, digitalisasi UMKM, promosi produk UMKM di pasar ekspor, penajakan bisnis (business matching), pelatihan SDM ekspor, pelatihan pembentukan fasilitator edukasi perdagangan melalui sistem elektronik, dan program pendampingan ekspor.

Kemitraan yang selama ini dilakukan Indogrosir yaitu melalui penyediaan pasokan barang dagangan kepada toko/warung tradisional yang menjadi pelanggan Indogrosir (warung member merah).

Selain itu, ada program paket warung start up modern dalam bentuk Toko Mandiri Indogrosir (TMI) yang merupakan contoh kemitraan antara grosir modern dengan toko/warung tradisional.

Zulhas berharap, kemitraan antara Indogrosir dan UMKM dapat terus terjalin dan semakin bertumbuh serta semakin sukses mengembangkan usaha.

“Kami berharap Indogrosir dapat memperluas cakupan kemitraan kepada warung member merah, bukan hanya dalam hal penyediaan pasokan barang, melainkan

dalam bentuk pelatihan terkait manajemen ritel yang baik kepada warung UMKM yang menjadi mitranya,” terangnya.

Digitalisasi UMKM

Wakil Menteri Perdagangan, Jerry Sambuaga, mengingatkan, digitalisasi terhadap UMKM saat ini sudah menjadi keharusan. Sejak pandemi Covid-19, pola belanja masyarakat semakin berubah. Saat ini, masyarakat lebih memilih berbelanja secara daring.

“Pemerintah saat ini tengah gencar mendorong pelaku UMKM untuk ‘melek’ digital. Melalui kegiatan ini, kami harap akan semakin banyak produk Indonesia yang tampil di katalog elektronik (e-katalog) pemerintah, sehingga percepatan transformasi digital di bidang perdagangan barang/jasa pemerintah dapat tercapai sesuai Perpres Nomor 17 tahun 2023,” ungkap Jerry pada pertemuan Anggota Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Program Retail Masuk Katalog Pemerintah Sekaligus Mendukung Beli Buatan Indonesia di Jakarta, Jumat, 7 Juli 2023. ●



SATU-SATUNYA PERAIH SATYALANCANA PEMBANGUNAN

Herman Deru Terbaik Nasional Turunkan Stunting

Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, dan Ketua TP PKK Sumsel, Febrita Lustia HD, mencatatkan prestasi pada puncak peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-30 yang dipusatkan di Kabupaten Banyuasin, Kamis, 6 Juli 2023.

Keduanya masing-masing menerima penghargaan berupa Anugerah Tanda Kehormatan Satyalancana. Bedanya, Herman Deru menjadi Gubernur satu-satunya yang mendapatkan Satyalancana Pembangunan dari Presiden RI. Sedangkan, Ketua TP PKK Sumsel mendapatkan penghargaan tanda kehormatan Satyalancana Wira Karya bersama sejumlah Gubernur, Bupati dan Wali Kota lainnya se-Indonesia.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Diberikannya Tanda Kehormatan Satyalancana Pembangunan kepada Herman Deru merupakan penghargaan atas jasanya terhadap negara dan masyarakat dalam lapangan pembangunan negara pada umumnya, atau dalam lapangan pembangunan sesuatu bidang tertentu pada khususnya. Salah satunya atas keberhasilannya menurunkan angka stunting terbaik nasional sebesar 6,2 persen.

Tak hanya itu, atas komitmen dan partisipasi aktifnya dalam menyukseskan program Bangga Kencana dan upaya percepatan penurunan stunting di Sumsel, Herman Deru juga secara resmi dikukuhkan sebagai Duta Bapak Asuh Anak Stunting langsung oleh Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengata-



kan, berdasarkan statistik PBB, ada 22 persen balita di dunia mengalami stunting dengan jumlah diperkirakan 149 juta balita.

Menurut Wapres, dari 149 juta balita tersebut, ada 6,3 juta balita Indonesia mengalami stunting pada 2020 berdasarkan data PBB. Angka itu penting diturunkan demi kualitas SDM di Indonesia.

Wapres mengatakan, persoalan stunting bukan hanya perkara tinggi badan. Namun, stunting dapat berdampak buruk pada kualitas hidup individu tersebut. Misalnya menyebabkan penyakit kronis, tertinggal dalam kecerdasan dan kalah dalam persaingan.

Wapres juga mengingatkan bahwa persoalan stunting ini harus ditangani dengan serius karena dampak buruknya dapat termanifestasi dalam waktu bertahun-tahun.

"Mengutip kalimat UNICEF yang menyatakan anak stunting memiliki badan dan otak yang stunting. Anak stunting memiliki kehidupan yang stunting pula. Dampak penuh dari stunting di masa kecil mungkin baru termanifestasi dalam waktu bertahun-tahun ke depan dan akibatnya terlambat untuk diatasi. Oleh sebab itu, kita mesti serius melakukan upaya menurunkan angka stunting di negara kita," ujarnya.

Wapres mengatakan angka stunting Indonesia saat ini mencapai 21,6 persen. Angka stunting itu harus berhasil diturunkan untuk mengejar target 14 persen pada 2024.

"Saya ingatkan kembali prevalensi stunting di Indonesia saat ini adalah 21,6 persen. Ini supaya kita sadar. Sementara target kita adalah 14 persen pada 2024. Sisanya ting-

gal, tidak sampai 2 tahun. Artinya, secara nasional setiap tahun 2023, 2024, itu kita harus menghasilkan, bisa menurunkan 3,8 persen kalau untuk 14 persen," tambahnya.

Wapres juga menyoroti fenomena pernikahan anak. Pernikahan anak memang tak dilarang, tapi akan menimbulkan efek negatif, seperti bayi yang dilahirkan mengalami stunting. Oleh karena itu, Ma'ruf mengingatkan kepada orang tua untuk lebih ekstra mengawasi remajanya agar berperilaku hidup dan pergaulan sehat.

"Bagi keluarga yang memiliki anak remaja agar dipastikan remaja kita mempunyai perilaku hidup dan pergaulan yang sehat. Patut menjadi keprihatinan kita bersama masih relatif tingginya angka pernikahan anak," ujar Wapres Ma'ruf. ●



Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di bawah kepemimpinan Gubernur Herman Deru dan Wakil Gubernur Mawardi Yahya (HDMY) terus berupaya memberi perhatian lebih kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan mengajak para kepala daerah untuk memotivasi usaha kecil di wilayahnya agar naik kelas melalui Sriwijaya Expo 2023.

Sriwijaya Expo 2023 diharapkan agar produk UMKM Sumsel lebih dikenal luas, bukan hanya di dalam daerah tapi nasional, sehingga dapat bersaing di pasar global.

“Harapan saya kegiatan seperti ini akan mendorong produk UMKM Sumsel agar naik kelas. Jadi tidak hanya menjelang hari-hari besar seperti dalam rangkaian HUT Pemprov Sumsel saja digelar. Untuk membantu UMKM, kita laksanakan terus menerus sesuai dengan kemampuan kita, baik sebagai perorangan maupun instansi,” kata Herman Deru.

Melihat gelaran Sriwijaya Expo setiap tahun, Herman Deru merasakan ada kemajuan yang sangat berarti bagi para UMKM ini. Untuk itu, dinas yang membina dapat melaksanakan pembinaan UMKM agar produk yang dihasilkan berkualitas tinggi. Selain itu, produk juga didaftarkan E-katalog agar nanti para pengguna mendapatkan referensi barang yang dibutuhkan.

“Kepada bupati/wali kota untuk terus mendukung UMKM dalam memproduksi produk bermutu dari hulu sampai hilir. Tanpa dorongan kita tentu akan lamban maju,” ujarnya.

Tak hanya itu, sebagai bentuk perhatiannya kepada UMKM, Herman Deru juga meminta kepada Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan BUMN/BUMD agar mempermudah pelaku usaha mendapat modal, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR).

“Termasuk para instansi vertikal yang membidangi agar terus memberikan bantuan keterampilan, bila perlu diadakan studi tiru terhadap daerah lain,” tutur Herman Deru.



Sriwijaya Expo 2023

TINGKATKAN KEMANDIRIAN UMKM

Penyelenggaraan Sriwijaya Expo digelar dalam rangka memeriahkan HUT ke 77 Pemprov Sumsel tahun 2023. Kegiatan ini bertujuan mempromosikan produk unggulan, jasa, industri kecil dan kerajinan daerah, serta sarana untuk menukar informasi kepada masyarakat tentang hasil-hasil pembangunan berskala nasional.

Sriwijaya Expo 2023 ditutup Wakil Gubernur Mawardi Yahya didampingi Wakil Ketua Dekranasda Sumsel, Fauziah MY. Penutupan Sriwijaya Expo 2023 kali ini ditandai dengan pemberian piagam penghargaan bagi para pemenang pada masing-masing kategori.

Mawardi Yahya mengatakan, Sriwijaya

PEMENANG DALAM AJANG SRIWIJAYA EXPO 2023:

Kategori Instansi Pemerintah Provinsi

Juara I Dinas PSDA Provinsi Sumsel

Juara II Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumsel

Juara III Dinas Pertanian TPH Provinsi Sumsel

-Kategori Instansi Kabupaten/Kota/ Dekranasda

Juara I Kabupaten Muara Enim

Juara II Kabupaten Empat Lawang

Juara III Kabupaten OKI

-Kategori BUMN, BUMD dan Perusahaan Swasta

Juara I SKK Migas

Juara II PT Pusri

Juara III Semen Baturaja.

berkarya, ini juga berdampak pada kemajuan yang sangat berarti bagi para UMKM di Sumsel, sehingga mampu bersaing,” tambahnya.

Sementara, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perindustrian Sumsel, Mega Nugraha, mengatakan, Sriwijaya Expo 2023 dilaksanakan dalam rangka memeriahkan HUT Sumsel sebagai pusat informasi bagi pengembangan, industri menengah dan besar, serta sebagai ajang hiburan bagi masyarakat.

“Sriwijaya Expo ini telah digelar mulai dari 24 hingga 28 Mei 2023. Melibatkan 110 stand, terbagi dari stand pemerintah provinsi, kabupaten/kota sebanyak 70 stand dan 40 stand merupakan UMKM,” jelasnya.

Mega menuturkan, Sriwijaya Expo juga diisi dengan sejumlah agenda. Selain pameran multi produk, juga digelar workshop, talkshow kewirausahaan, donor darah, dan konser band lokal maupun nasional.

“Promosikan produk unggulan, jasa dan industri kecil berskala nasional. Pameran yang lengkap dan bermutu ini berhasil mempromosikan potensi daerah sekaligus produk yang dihasilkan. Hal ini juga sebagai media yang akan menjadi peluang investasi dan sektor strategis lainnya,” terangnya.

Penutupan Sriwijaya Expo 2023 juga dimeriahkan hiburan dengan menghadirkan sejumlah artis ibu kota yang mendapatkan sambutan meriah dari warga Kota Palembang yang memadati lokasi penutupan Sriwijaya Expo 2023. ●

Expo 2023 banyak membawa manfaat bagi UMKM dan IKM yang diharapkan dapat mendorong meningkatnya perekonomian masyarakat Sumsel.

“Sriwijaya Expo 2023 menjadi wadah dalam membangun inovasi memasarkan produk hasil UMKM di setiap kabupaten/kota. Ini juga merupakan cara Pemprov meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ucap Wagub.

Menurut Mawardi, kegiatan ini juga bertujuan untuk mempromosikan produk unggulan, jasa, industri kecil dan kerajinan daerah. Kemudian, dapat jadi sarana tukar menukar informasi terkait hasil-hasil pembangunan ke level nasional dengan menghadirkan pameran yang lengkap dan bermutu.

“Meningkatkan ekonominya, berinovasi,





HARUMKAN SUMSEL DI KANCAH NASIONAL

Kiprah Ketua TP PKK yang juga Dekransada Sumsel, Febrita Lustia HD, dalam mengembangkan kekayaan kain tradisional di Bumi Sriwijaya memang tak perlu diragukan. Hal ini dibuktikan dengan prestasinya yang berhasil meraih Anugerah Tokoh Inspiratif di Festival6 dari Kapanlagi Universe (KLY) yang digelar di Senayan Park, Sabtu, 8 Juli 2023.

Gelaran Festival6 yang sudah keempat kalinya digelar KLY ini mempertemukan berbagai generasi dengan ide dan kreatif ini menghadirkan serangkaian acara. Salah satunya adalah Anugerah Tokoh Inspiratif yang diterima oleh Febrita Lustia HD.

Perempuan yang akrab disapa Feby

menimbulkan rasa mencintai dan memiliki warisan budaya yang ada.

Feby juga memperlihatkan salah satu warisan budaya asal daerahnya yaitu kain tenun Tajung. Kain tersebut ditampilkan bersama desainer Putroh Ramadhan.

"Kain yang ditampilkan adalah kain untuk pria yang biasa dipakai untuk kegiatan

tan adat, resepsi pernikahan, dan kesehariannya.

Salah satu alasan mengapa dipilih kain tenun Tajung tak lain agar kain tersebut tak hanya terbatas digunakan kaum adam. Dia berharap dengan kain tenun Tajung yang didesain menjadi pakaian jadi itu juga dapat digunakan untuk para wanita pada acara resmi atau acara santai.

Dalam gelaran tersebut, ada enam koleksi dari pesona kain tenun Tajung yang ditampilkan di atas panggung Festival6. Koleksi tersebut sengaja didesain agar terlihat lebih modern dengan perpaduan kain denim.

"Koleksi ini dapat digunakan untuk generasi milenial yang menonjolkan jiwa anak muda. Dipadukan dengan jeans dan kain lawas untuk memunculkan pesona yang lebih edgy dan anak muda banget," kata Putroh.●



Deru ini menerima penghargaan dalam kategori Tokoh Inspiratif Pegiat Kelestarian dan Pengembangan Budaya Berbasis UMKM.

"Terima kasih kepada Liputan6 yang memberikan penghargaan kepada kami. Dengan mendapatkan penghargaan ini, tentunya dapat memacu kami untuk lebih semangat dalam berkarya. Semoga kami dapat terus memajukan Sumatera Selatan," ujar Feby Deru.

Untuk mempromosikan Sumatera Selatan, Feby menggandeng kaum muda di daerahnya untuk berkolaborasi dengan cara berkarya. Kolaborasinya dengan generasi muda sengaja dilakukan untuk

adat, resepsi pernikahan. Kami mengajak desainer untuk mengangkat kain tenun Tajung yang menjadikan kaum muda untuk menggunakannya," ujar Feby.

Feby mengatakan, kolaborasinya dengan Putroh Ramadhan menjadi langkah tepat untuk mempromosikan warisan budaya.

"Kami mengajak desainer muda untuk mengangkat kain tenun warisan budaya agar anak muda mau mengetahui dan mau menggunakannya," kata Feby.

Pesona kain tenun Tajung dipamerkan di panggung Festival6 dengan tampilan 'baru'. Kain Tajung sebenarnya adalah kain yang dipakai para pria untuk kegiatan

